

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PELANGGARAN HAK ANAK
(Studi Putusan PN Nomor: 863/Pin.B/2015/Pn Dps)**

Christine Lieanty Anusta

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pelaku pelanggaran hak anak dalam perkara perkara Nomor: 863/Pin.b/2015/Pn Dps dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam perkara Nomor: 863/Pin.b/2015/Pn Dps. Anak adalah generasi bangsa yang akan meneruskan cita-cita negara kita, oleh karena itu perlindungan anak dalam tumbuh dan berkembangnya harus lah dilindungi, maka penegakan hukum merupakan tindakan untuk menentukan pidana yang dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban

Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif dengan menganalisa norma hukum positif, yurisprudensi dan doktrin yang berkaitan dengan masalah. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini adalah meneliti data primer yaitu Direktori Putusan Mahkamah Agung RI lalu meneliti data sekunder yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian pengumpulan data dan penelitian pada pada studi putusan pengadilan, buku-buku hukum dan berita yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 863/Pin.b/2015/Pn Dps sebelum memutuskan hakim mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, barang bukti keterangan terdakwa yang harus disertai dengan alat bukti lainnya dan pertimbangan hakim sendiri serta pertimbangan yuridis, dan non yuridis serta keadaan yang memberatkan dan meringankan posisi terdakwa. Dalam pertimbangan ini penulis berpendapat bahwa tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim terlalu kurang tepat. pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak anak dalm perkara Nomor: 863/Pin.b/2015/Pn Dps di tentukan dari adanya suatu tindakan kesalahan dan tindakanya telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Pelaku melakukan tindak pembunuhan berencana, Eksploitasi, Penelantaran, dan Diskriminatif pelaku telah memenuhi unsur-unsur dari tiap tindakannya dan harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah ia buat, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Kata kunci: Pelanggaran Hak Anak, Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hukum, Putusan Hakim, Majelis Hakim

**LAW ENFORCEMENT AGAINST CHILD RIGHTS
VIOLATIONS**
(Study on PN District Decision Number: 863/Pin.B/2015/Pn Dps)

Christine Lieanty Anusta

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the criminal responsibility of the perpetrator for the violation of children's rights in case number perkara Nomor: 863/Pin.b/2015/Pn Dps and legal considerations by the panel of judges in case number: 863/Pin.b/2015/Pn Dps. Children are the nation's generation who will continue the ideals of our country. Therefore, the protection of children in their growth and development must be protected. Law enforcement is an action to determine the criminal imposed as a form of accountability.

This study uses a normative juridical research method by analyzing positive legal norms, jurisprudence, and doctrine related to the problem. The data collection method for this research is to examine primary data, namely the Directory of Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, and then examine secondary data, namely primary, secondary and tertiary legal materials. Then data collection and research on the study of court decisions, law books, and news related to the problem is being researched. The type of research approach used is a qualitative research approach. The data collected will be analyzed to get answers to the problems.

The results showed that the judge's consideration in deciding the case Number: 863/Pin.b/2015/Pn Dps before deciding the judge considered the demands of the public prosecutor, witness statements, evidence of the defendant's testimony which must be accompanied by other evidence and the judge's own considerations and considerations. juridical, and non-juridical as well as aggravating and mitigating circumstances of the defendant's position. In this consideration, the writer is of the opinion that the demands of the public prosecutor and the judge's decision are too inaccurate. Criminal liability for perpetrators of criminal acts of violation of children's rights in case Number: 863/Pin.b/2015/Pn Dps is determined from the existence of an act of error and the action has fulfilled the elements stipulated in the child protection law. The perpetrator committed premeditated murder, exploitation, neglect, and discrimination. The perpetrator has fulfilled the elements of each of his actions and must be responsible for the actions he has made, regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: Violation of Children's Rights, Criminal Liability, Legal Considerations, Judge's Decision, Panel of Judges.